

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang -undangan

KUHP Perdata

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonseia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria. Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasiona Republik Indonesia Nomor.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BPN RI No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Konversi Hak Penguasaan Ke Hak Pakai atau Hak Pengolaan.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Buku

Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria “Pertanahan Indonesia” jilid 1, Jakarta:prestasi pustaka

Bernhard Limbong, 2012 “konflik pertanahan” , Jakarta:pustaka Margaretha.

Boedi Harsono, 2005 Hukum Agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok Agraria, Jakarta:diambatan

Diyan Isnaeni dan Suratman, 2018, *Reforma Agraria (Landreform dan Redistribusi Tanah di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, h.1.

Fathul Achmad Abby, dkk, 2013, redistribusi, tanah dalam Reforma Agraria, Banjarmasin:Aura Pustaka

Grinta Surya Sulistyorini, 2018, Pelaksanaan Access Reforma Dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Gunawa Wiradi, 2009, *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agrarian Dan Penelitian Agrarian*, h.3.

Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ELSAM : Jakarta. h.13.

- Harsono dalam Andi Achdian, 2009, *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, Bogor: Kekal Press Bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, h.72.
- Imam Sudiyat, 1980, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah Di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Cv Bina Usaha. Yogyakarta.
- Julius Sembiring, 2018, *Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara*, (Devisi Kencana), Cetakan ke-2, h.2.
- Martinus Nijhof Social Sciences Division. Leiden/Boston.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015 “Reforma Agraria di Indonesia” , Jakarta:sinar grafika
- Noer Fauzi, 1 Mei 2003, *Catatan Ringkas, Disampaikan Dalam Acara “Temu-Tani Se-Jawa”*, Di YTKI, Jakarta, h.6.
- Rusmadi Murad, 1999, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung : Alumni, h,22-23.
- Setiawan B, 2001, *Konsep pembaharuan agraria: Sebuah tinjauan umum*, dalam Tim Lopera, *Prinsip-prinsip Reforma Agraria, Jalan penghidupan dan kemakmuran rakyat*, Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Soetarto, E, Sihalo, M & Purwandari, H, 2007, *Land reform by leverage: kasus redistribusi lahan di Jawa Timur*, Jurnal Sodality, vol. 1
- Umar Said Sugiharto, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Publikasi Online
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria, Kajian Konprehensif*, Jakarta;Kencana Prenada Media Group, h. 153-154.

- Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*,
Mandar Maju, Bandung, h.1
- Wiradi, G 2009, *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum berakhir (Edisi Revisi)*,
Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurnaningsih Armani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta,

Jurnal

- Abdi Insani, 2021, “Sosialisas Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan
Tanah di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”,
Vol 8, h.108.
- Andi Bustamin Daeng Kunu, 1 Januari-April 201, “Kedudukan Hak Menguasai
Negara Atas Tanah”, fiat justitia jurnal ilmu hukum Vol 6.
- Tanjung Nugroho, Akur Nurasa, Desember 2014, “Permasalahan Surat Ijin Memakai
Tanah Negara Sebagai Alas Hak Dalam Pendaftaran Tanah, Pusat Penelitian
Dan Pengabdian Kepada Masyarakat”, sekolah tinggi pertanahan nasional.
- Hamka, Z. 2014. *Mediasi-Arbitrase dan Arbitrasi-Mediasi Sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin
- Abdurrasyid, P. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu
Pengantar*, Jakarta: Penerbit PT Fikahati Aneska – BANI

Maria S.W. 2001. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Website

Abdul Halim, 2023, Ketua Perkumpulan Warjoyo, “kronologi warjoyo”, diakses pada jam 20.27.

Artikel [Legalitas: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Aspeknya! \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com), diakses 9 Januari, pada pukul 00.56

Artikel “Konsekuensi Jika Hak Atas Tanah Lama Tak Segera Diurus Sertifikatnya”, Diakses 03 Januari, [Konsekuensi Jika Hak Atas Tanah Lama Tak Segera Diurus Sertifikatnya \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com)

Artikel “Pengertian Egendom Dan Konversinya”,diakses 18 Januari, pada pukul 03.13, [Pengertian Eigendom dan Konversinya - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut \(uma.ac.id\)](https://www.uma.ac.id)

Diakses Pada 5 April, <http://repository.unpas.ac.id/28632/4/G.%20BAB%20II.pdf>, hal 34

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Surabaya, 2021, ”Kebijakan Terkait Sengketa Tanah Bumiarjo Sawunggaling”, diakses 23 Januari 2024, <https://fraksi.pks-surabaya.or.id/fatkur-rohman-pemkot-mesti-buat-kebijakan-terkait-sengketa-tanah-bumiarjo-sawunggaling/>

Kurnia Warman, 2018, “Groundkaart PT.KAI tidak Terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Sehingga Menjadi Lahan Negara Bebas”, Bandar Lampung, diakses dari <https://www.lampunglive.com/2018/08/28/dr-kurnia-warman-sh-m->

hum-groundkaart-pt-kai-tidak-terdaftar-di-bpn-sehingga-menjadi-lahan-negara-bebas/

"Legalitas", (<https://kbbi.web.id/legalitas>, Diakses 06 Januari 2024, 21.47WIB"

Muhammad Ikhsan selaku Direktur Jenderal Penataan Agraria, 29 Maret 2018 menyampaikan dalam <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/pejuang-dan-tantangan-reforma-agraria-75213>

Rachmatunnisya, dibuat 13 Maret 2023, diakses 9 Januari 2024, pukul 01.44, [KMS:: Aspek Hukum Tanah Aset Negara Seri I "Dasar Legitimasi Hak Menguasai Negara atas Tanah" \(kemenkeu.go.id\)](#)

Rahadian, Rabu, 27/09/2017 “Menyampaikan Dalam Bentuk Artikel <https://www.cnnindonesia.com/demo-tani-reforma-agraria-bukan-sekadar-sertifikasi-tanah> Komite Nasional Pembaruan Agraria(KNPA) CNN Indonesia” | 13:57 WIB

“Sosial Asset Versus Capital Aset” diakses 9 Januari 2022 ”, <https://aventsaur.wordpress.com>

Tesis

Kusuma, D. A. (2017). “Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Yang Kuat”.

Tesis: Magister Kenotarian Universitas Mataram.